

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian dapat dicerminkan melalui perubahan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) unit usaha di suatu wilayah (Suryono, 2010). Keberhasilan perekonomian akan memicu minat masyarakat untuk terus bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi, ini merupakan peluang yang baik untuk melakukan investasi. Investasi dapat mendorong kegiatan produksi dan meningkatkan jumlah barang dan jasa sehingga akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan jumlah penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian suatu daerah juga akan berdampak pada peningkatan permintaan kredit modal (Mishkin, 2008).

Secara umum, keberhasilan dalam suatu usaha ditentukan dengan kecukupan modal yang dimiliki. Semakin besar dana yang tersedia maka tingkat keberhasilan suatu usaha akan bertambah, karena dengan modal yang besar pemilik biasanya mampu mengembangkan usaha dan bertahan dalam persaingan pasar. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM merupakan usaha kerakyatan yang jumlahnya mendominasi di Indonesia (Sugiyono, 2019). UMKM berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional karena dengan jumlahnya yang banyak UMKM dapat menyerap tenaga kerja dan menyumbang kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada tahun 2021 mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (bpkm.go.id, 2022).

Meski peran UMKM terhadap kontribusi PDB dan perekonomian yang besar tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi beberapa kendala untuk mengembangkan usahanya, diantaranya dari sisi permodalan. Menurut LPPI dan BI (2015) Minimnya sumber pembiayaan yang tersedia dan rendahnya kualitas SDM, menyebabkan para pelaku usaha belum mampu mengembangkan usahanya supaya berdaya saing global dan mampu mengikuti perubahan selera konsumen. Kendala UMKM dalam mengakses pembiayaan dari bank dinilai karena belum adanya titik temu antara pihak debitur dan kreditur. Dari sisi pelaku usaha, beberapa masalah dalam mengakses permodalan adalah suku bunga bank yang tinggi dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan agunan. Sedangkan dari sisi perbankan selaku lembaga penyedia dana mempersoalkan ketidaksiapan usaha, terletak pada belum adanya kelayakan usaha, baik aspek keuangan maupun aspek pemasaran dan tenaga kerja (Badriyah, 2009).

Pemerintah menginisiasi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan akses sumber pembiayaan yang dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR. Lembaga keuangan yang telah diberi mandat oleh pemerintah untuk menyalurkan program KUR. Berdasarkan data dirilis Kementerian Perekonomian, pada tahun 2015 realisasi penyaluran KUR sebanyak Rp22,75 triliun dan terus mengalami kenaikan di tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai Rp281,86 triliun pada 2021 (kur.ekon.go.id, 2022). Jumlah penyaluran yang terus meningkat mengindikasikan besarnya minat masyarakat dalam mengakses dana KUR tak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat, menurut data kemenkeu kanwil djpb Provinsi Sumatera Barat hingga Juni 2021 total KUR yang telah terealisasi di Sumatera Barat yaitu sebanyak 3,39 Triliun untuk 73.885 debitur dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1 :Total Penyaluran KUR Sumatera Barat Menurut Sektor Ekonomi
Hingga Juni 2021**

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Penyaluran	Persentase
01	Pertanian Perburuan dan Kehutanan	1,11 Triliun	32,84 %
02	Jasa Kemasyarakatan, sosial Budaya, Hiburan dan perorangan Lainnya	142,54 Miliar	4,21 %
03	Industri Pengolahan	226,73 Miliar	6,69 %
03	Perdagangan Besar dan Eceran	1,67 Triliun	49,40 %
05	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	108,69 Miliar	3,21 %
06	Sektor lainnya	123,54 Miliar	3,65 %

Sumber : <https://djpb.kemenkeu.go.id/>

Disisi lain, berdasarkan data Susenas tahun 2019, penerimaan KUR pada bidang usaha non-pertanian di wilayah Pulau Sumatera dengan akumulasi tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1478 orang dan penerima KUR terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu 159 orang (Dharma, 2021). UMKM yang diharapkan bisa mengakses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat merupakan UMKM yang bergerak di sektor usaha produksi diantaranya perikanan, pertanian, industri pengolahan dan lainnya. Dalam perkembangannya, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling dominan memperoleh KUR. Oleh karena itu, Komite Kebijakan memutuskan target penyaluran KUR untuk sektor produksi pada bulan Januari 2017 minimal 40 % dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 target KUR untuk sektor produksi minimal 60% (kur.ekon.go.id, 2022).

Sebanyak 89% perekonomian masyarakat Sumatera Barat digerakkan oleh sektor UMKM. Pada tahun 2020 terdapat 593.100 UMKM di Sumatera Barat yang terdiri dari mikro sebanyak 531.350 atau 89,59 %. Sedangkan pelaku usaha kecil

sebanyak 53.431 atau 9,01 %, pelaku usaha menengah sebanyak 7.990 atau 1,33 % dan pelaku usaha besar sebanyak 419 atau 0,07 % (Badan Pusat Statistik, 2020). Potensi UMKM yang sangat besar di Sumatera Barat perlu didukung salah satunya melalui kemudahan dalam mengakses permodalan, ketika akses terhadap suatu sumber permodalan meningkat seiring dengan itu akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses permodalan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas terkait faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi UMKM dalam mengakses pembiayaan pada lembaga keuangan formal, Masih terdapat *research gap* pada hasil penelitian dimana menunjukkan perbedaan dan hasil yang tidak konsisten.

Bidang usaha individu dapat menggambarkan kemampuan individu dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan. Beberapa penelitian seperti Dharma (2021) menemukan bahwa lapangan usaha berpengaruh negatif terhadap penerimaan KUR temuan ini bertolak belakang dengan penelitian Messah dan Wangai (2011) menemukan hubungan yang positif.

Variabel lain yang mempengaruhi aksesibilitas sumber permodalan seperti usia. Penelitian Messah dan Wangai (2011) menemukan variabel usia mempunyai hubungan positif terhadap keputusan mengambil kredit. Berbeda dengan Wati (2015) dan Pratiwi (2015) yang menunjukkan usia mempunyai pengaruh negatif terhadap akses pembiayaan. Sedangkan Anwar (2013) menemukan variabel usia tidak berpengaruh signifikan.

Beberapa penelitian lainnya juga menjelaskan keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan akses kredit usaha. Penelitian Utama (2012), Pratiwi (2015) dan Dharma (2021) untuk variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan artinya tidak ada pengaruh tingkat pendidikan individu dalam peluang mendapatkan pembiayaan. Sedangkan Messah dan Wangai (2011) Anwar (2013) dan Sugiyono (2019) menemukan variabel tingkat pendidikan memiliki hubungan positif signifikan,

semakin tinggi tingkat pendidikan individu semakin lebih berpotensi mendapatkan pembiayaan.

Selain itu variabel jenis kelamin pelaku usaha juga mempengaruhi aksesibilitas penerimaan kredit. Remenyi (2000) menyatakan nasabah dengan tingkat pengembalian kredit yang bagus akan lebih berpeluang mendapatkan kredit dari perbankan karena dapat mengurangi resiko kredit. Dalam pengembalian kredit pemilik usaha perempuan lebih disiplin daripada pemilik usaha laki-laki. sejalan dengan penelitian Panjaitan *et al.*, (1999) yang menemukan bahwa di Indonesia tingkat kelancaran pembayaran kredit mikro untuk perempuan lebih besar yaitu sebesar 91% untuk perempuan dibanding laki-laki sebesar 80%. Sedangkan penelitian Diana (2018) menyebutkan pengusaha laki-laki memiliki peluang lebih besar mengakses pembiayaan dan Sugiyono (2019) menemukan pengusaha laki-laki lebih berpotensi 1,405 kali dibanding perempuan dalam mengakses kredit modal usaha.

Berdasarkan uraian dan *research gap* yang sudah disajikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan kajian dengan menggunakan data Susenas untuk menjawab apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pada penerimaan kredit. Dalam penelitian dengan judul **“Analisis Aksesibilitas Pelaku UMKM Mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Sumatera Barat Berdasarkan Data Susenas 2019“**

1.2 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kekaburan dan agar penelitian dapat lebih terfokus sehingga tidak melebar dari permasalahan yang dimaksudkan, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh pengaruh lapangan usaha, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengeluaran per kapita, tipe daerah dan kepemilikan surat tanah terhadap peluang pelaku UMKM mendapatkan KUR di Sumatera Barat berdasarkan analisis data Susenas pada tahun 2019.

Alasan Provinsi Sumatera Barat diambil sebagai objek penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana karakteristik masyarakat Sumatera Barat dalam penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat. Selain itu, menurut Dharma (2021) karena perbedaan luas wilayah yang cukup signifikan serta kondisi geografis yang berbeda, perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi, perbedaan sektor andalan masing-masing wilayah, dan juga karena perbedaan struktur masyarakat sehingga penerimaan KUR di Pulau Sumatera didominasi oleh Provinsi Sumatera Barat, dan penerima KUR terkecil adalah Provinsi Kepulauan Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh lapangan usaha terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
2. Bagaimana pengaruh umur terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
3. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan pengusaha terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
5. Bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
6. Bagaimana pengaruh pengeluaran per kapita terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan surat tanah terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
8. Bagaimana Pengaruh tipe daerah terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh lapangan usaha terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh umur terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran per kapita terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan surat tanah terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.
8. Untuk mengetahui pengaruh tipe daerah terhadap peluang UMKM untuk mendapatkan KUR di Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti yaitu analisis faktor apa saja yang mempengaruhi UMKM mendapatkan KUR di Sumatera Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dengan KUR seperti pengusaha, pemerintah, dan lembaga keuangan. Penelitian ini juga dapat menambah referensi sehingga bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, seputar faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pelaku UMKM mendapatkan KUR di Sumatera Barat.